

Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila

Azyumardi Azra

Abstrak

Turmoil identity became one of the most obvious symptoms of Indonesian community in the Post-Soeharto Era. The roots of the turmoil of identity is not only related to changes in political, social, economic, cultural and religious locally internally, but also with the expansion and penetration of the change and globalization. The emergence of social violence, loss of patience, social temper, the decline of respect and obedience to the law, ethics and morals, as well as the nuances of ethnic and religious conflict showed persistent social crisis that followed the disorientation of cultural identity.

Key words: kegalauan identitas, krisis identitas, kekerasan sosial, multikulturalisme, demokrasi, rejuvenasi Pancasila, bhinneka tunggal ika.

Pendahuluan

Belum lama ini saya membaca buku *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Orde Baru* (Eds, Martin Ramstedt & Fadjar Ibu Thufail, 2011). Delapan tulisan yang termuat di dalam buku ini membuat saya galau karena memberikan gambaran relatif lengkap tentang berbagai bentuk peristiwa dan kajian menyangkut 'krisis identitas' yang bisa membuat kita pesimis tentang masa depan Indonesia.

Semua artikel tersebut menggambarkan masih berlanjutnya disorientasi identitas dan dislokasi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang pernah terjadi pada 1997-1998 dan tahun-tahun selanjutnya, dan dalam batas tertentu pada akhir 2008 (*sub-prime mortgage crisis* di AS), juga mengakibatkan terjadi dan bertahannya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (*fabric of society*) dan bahkan identitas personal dan komunal terus galau. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan sosial dan bahkan terorisme—bahkan atas nama agama—terus pula terjadi. Dan, semua perkembangan ini mau tidak mau mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia lahir-batin.

Krisis sosial budaya—yang diikuti kekerasan sosial dalam berbagai bentuknya—muncul dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi identitas banyak kalangan masyarakat kita. Juga masih ada gejala disintegrasi sosial-politik yang antara lain juga disebabkan euforia demokrasi yang hampir kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial (*social temper*) dalam menghadapi realitas kehidupan yang kian sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan sosial dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan kepada hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba dan penyakit sosial lainnya; pecahnya konflik dan kekerasan yang bersumber—atau sedikitnya bernuansa etnis dan agama seperti pernah terjadi di berbagai wilayah tertentu Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi.

Disorientasi identitas, berbarengan dengan dislokasi atau krisis sosial-budaya di kalangan masyarakat kita semakin bertambah dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat—khususnya Amerika—sebagai akibat proses globalisasi yang hampir tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya “*alien*” (asing), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita semakin menyebar pula dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan “gaya hidup” baru yang tidak selalu positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa. Hal ini bisa dilihat dari semakin merebaknya budaya “McDonald”, makanan instan dan, dengan demikian, budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang menyebarkan permissivisme, kekerasan, dan hedonisme; mewabahnya MTVisasi, “Valentine’s Day”, dan kini juga “*prom’s night*” di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak lain daripada “*cultural imperialism*” baru, menggantikan imperialisme klasik yang terkandung dalam “*orientalisme*”.

Dari berbagai kecenderungan ini, orang bisa menyaksikan kemunculan identitas yang majemuk dan kultur hybrid di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan berbagai macam identitas diri dan budaya hybrid nampaknya tidak terelakkan. Tetapi pada segi lain, identitas diri dan budaya hybrid—apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka—dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal; padahal identitas nasional sangat krusial bagi integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa.

Kontestasi Identitas

Memang, kegalauan identitas merupakan salah satu gejala paling jelas dalam masyarakat Indonesia pada masa Pasca Soeharto. Akar-akar kegalauan identitas itu tidak hanya terkait dengan perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama secara internal lokal, tetapi juga dengan ekspansi dan penetrasi perubahan dan globalisasi. Karena itu, terjadi akumulasi akar-akar kegalauan yang kemudian mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk.

Di tengah akumulasi itu, identitas warga baik secara personal maupun komunal mengalami kekacauan—yang di atas telah saya sebut sebagai ‘identitas hybrid’. Identitas hybrid ini bukan tidak mengandung kontradiksi satu sama lain, dan bahkan melibatkan kontestasi dalam diri maupun masyarakat.

Seorang pribadi kini bisa memiliki identitas yang lebih daripada ganda (*multiple identities*, bukan hanya *double identities*); bisa juga berbagai identitas itu saling melengkapi, seperti dikemukakan Von Benda-Beckman. Seperti banyak orang lainnya yang berakar dari etnis tertentu; saya lahir sebagai orang suku/etnis Minang dan beragama Islam, warga Indonesia, tapi juga dikenal pada tingkat internasional dengan identitas kosmopolit—sering dijuluki kawan-kawan di luar negeri sebagai ‘Ibn Bathutah’, atau ‘*globe-trotter*’ karena begitu seringnya mengadakan perjalanan melintasi benua untuk presentasi makalah atau *meeting* dari satu tempat di luar negeri. Di sini berbagai identitas lokal, nasional dan global bisa jalan beriringan—ditambah lagi identitas etnis dan keagamaan.

Dengan demikian berbagai identitas bisa berdampingan dengan damai—seperti saya rasakan. Tetapi bukan tidak mungkin dalam diri seseorang, sering identitas kesukuan dalam hal tertentu tidak kompatibel dengan identitas keagamaan, dan bahkan dengan identitas nasional dan internasional.

Dalam konteks agama, terdapat kalangan Muslim Indonesia yang lebih menonjolkan identitas Islam transnasionalnya, karena ia mendukung gagasan dan gerakan Islam transnasional. Implikasinya jelas, orang atau kelompok yang bersangkutan menganggap Muslim yang lebih menonjolkan identitas Islam Indonesia sebagai orang yang ‘tidak sempurna’ keislamannya. Lebih jauh penonjolan identitas Islam transnasional dengan segera mengalami kontestasi dan konflik dengan identitas nasional keindonesiaan.

Gejala yang sama adalah penguatan identitas kekristenan seperti terlihat dari rencana mengeluarkan Perda yang menetapkan Manokwari, Papua Barat sebagai ‘Kota Injil’. Rencana ini bahkan disebut sebagai pertanda meningkatkan ‘kelompok Kristen ekstrim’, tidak hanya di Papua Barat, tetapi juga di Minahasa. Berbagai denominasi Kristen yang bersifat transnasional ini juga menekankan Kristen ‘yang murni’, yang bebas dari tradisi dan praktik lokal seperti penggunaan jimat.

Kontestasi identitas nasional keindonesiaan juga kian sering terlibat dalam kontestasi dan konflik dengan identitas etnis-kesukuan. Memang, identitas etnis mengalami peningkatan dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999 dan kemudian disusul dengan penerapan Pilkada sejak 2005. Isu dan bahkan kemunculan Perda tentang seratus persen ‘putra daerah’ sebagai calon yang bisa diterima bermunculan di berbagai daerah. Dan ini jelas bertentangan dengan ketentuan NKRI yang menetapkan kesamaan dan kesetaraan setiap warganegara tanpa membedakan mana ‘putra daerah’ atau ‘putra asli’, ‘pribumi’ dan semacamnya.

Peningkatan identitas etnis ini juga sangat kompleks. Di NTB misalnya terjadi kontestasi antara etnis Sasak dengan etnis Bima. Pertarungan di antara kedua kelompok etnis ini meningkat pada musim-musim Pilkada. Bahkan sentimen etnis dapat tumpang tindih dengan semangat keagamaan, seperti muncul di Bali dalam bentuk keinginan kuat membentuk ‘pengadilan adat-agama [Hindu]’.

Kebangkitan berbagai identitas yang bisa terlibat dalam kontestasi dan konflik itu jelas menimbulkan banyak dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bentuk kekerasan sosial dan bahkan terorisme. Semua gejala yang tidak kondusif ini jelas bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, yang pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi.

Multikulturalisme: Bhinneka Tunggal Ika

Di tengah disorientasi identitas tersebut, Indonesia memiliki realitas pluralisme atau kemajemukan (multikultural), yang pada dasarnya memberikan tempat bagi *multiple identities* tersebut. Pluralisme kultural atau realitas multikultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, seperti dikemukakan Hefner (2001:4) sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itu dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini—khususnya Indonesia—dipandang sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat

majemuk/plural” (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnivall (1944, 1948).

Menurut Furnivall, “masyarakat plural” adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944: 446). Teori Furnivall ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang “homogen”, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat plural Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944: 468-9).

Meski demikian, berbeda dengan “*doomed scenario*” Furnivall, masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akhirnya setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukannya tidak sangat divisif, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan “*common platform*” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Padahal, kemerdekaan yang dicapai negara-negara baru ini mendorong bangkitnya sentimen etno-religius yang dapat sangat eksplosif, didorong semangat bernyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan (Geertz, 1973).

Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara-bangsa yang mengandung keragaman tersebut, para penguasa negara-negara baru memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” (monokulturalisme). Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan—khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno—dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme.

Secara restrospektif, politik mono-kulturalisme Orde Baru atas nama stabilitas untuk *developmentalism* telah menghancurkan *local cultural geniuses*, seperti tradisi “pela gandong” di Ambon, “republik nagari” di Sumatera Barat dan lain-lain. Padahal, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural, *local geniuses* yang berfungsi sebagai *defense mechanism* dan sekaligus *early warning system* yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Politik monokulturalisme yang menghancurkan *local genius*—seperti juga disinggung dalam buku ini—mengakibatkan kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan bernuansa etnis dan agama yang kian marak di beberapa daerah sejak 1996 sampai akhir Orde Baru terkait dengan hancurnya *local geniuses* tersebut.

Tetapi penting dicatat, dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan Orde Baru yang memaksakan “mono-kulturalisme”, keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi identitas personal dan komunal serta rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada dasarnya multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi, terjadi pula peningkatan “provinsialisme” yang tumpang tindih dengan “etnosentrisme”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali dapat menimbulkan disintegrasi sosial-kultural dan disintegrasi politik.

Sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kenyataan yang sulit diingkari, negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama

dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multi-kultural”. Tetapi pada pihak lain, realitas “multi-kultural” tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali identitas dan kebudayaan nasional Indonesia sehingga memberdayakan wawasan kebangsaan yang merupakan “*integrating force*” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Pandangan dunia “multikultural” secara substantif sebenarnya tidaklah baru di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara “bhinneka tunggal ika” mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan, yang menjadi dasar bagi wawasan kebangsaan dan integrasi nasional NKRI. Harus diakui, tidak banyak pembicaraan publik dalam masa pasca-Soeharto, 1998 sampai sekarang ini, tentang empat konsensus dasar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—yang terakhir ini merupakan landasan dan prinsip multikulturalisme Indonesia.

Pembentukan masyarakat multi-kultural Indonesia yang berbasiskan keempat konsensus dasar tadi tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan, dan bahkan perlu percepatan (akselerasi). Salah satu strategi penting akselerasinya adalah pendidikan multi-kultural melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Kebutuhan, urgensi, dan akselerasi pendidikan multi-kultural telah lama dirasakan mendesak bagi negara-bangsa majemuk lainnya. Di beberapa negara seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, yang sejak usai Perang Dunia II semakin “multi-kultural” karena proses migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut (Hefner, 2001: 2-3), pendidikan multi-kultural menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970an. Sebelumnya di AS telah dikembangkan “pendidikan inter-kultural”. Berhadapan dengan meningkatnya “multi-kulturalisme” di negara-negara tersebut, paradigma, konsep dan praktik pendidikan “multi-kultural” semakin relevan dan *timely*.

Pada pihak lain, gagasan pendidikan multikultural merupakan suatu hal baru di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara yang mengusulkan pendidikan multi-kultural di tanah air, tidak berkembang wacana publik tentang subyek ini. Pembahasan dan literatur mengenai subyek ini sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa, dalam masa Pasca Soeharto yang penuh dengan gejolak sosial-politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat, membuat pendidikan multi-kultural terasa semakin dibutuhkan.

Multikulturalisme; Basis Kewargaan

Keragaman, kebhinnekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk; tidak ada satu negara yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal.

Tetapi penting dicatat, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat dan negara-bangsa tidak berarti ketercerabutan identitas, relativisme kultural, disrupsi sosial

atau konflik berkepanjangan pada komunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasial. Sebab, juga terdapat berbagai simbol, nilai, struktur dan lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi.

Lembaga-lembaga, struktur dan bahkan pola tingkah laku (*patterns of behavior*) tersebut memiliki fokus tertentu terhadap kolaborasi, kerja sama, mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan berbagai perbedaan. Dengan demikian, mereka potensial untuk menyelesaikan konflik yang dapat muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Semua simbol, nilai, struktur dan lembaga tersebut juga sangat menekankan kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan masyarakat nasional.

Pada tahap ini, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial, atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (*humanness*). Semua ini juga mencakup komitmen dan kohesi kemanusiaan melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan berbagai simbol, doktrin, prinsip dan pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan—baik secara personal maupun komunal—dan kebudayaan yang dihasilkannya.

Dalam konteks ini, multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat merupakan titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multi-kulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya (*cultural basis*) bagi kewargaan, kewarganegaraan.

Multikulturalisme sebagai landasan budaya, lebih jauh lagi, terkait erat dengan pencapaian *civility* (keadaban) yang sangat esensial bagi demokrasi yang berkeadaban dan keadabanyangdemokratis (*democratic civility*). Dalam upaya penumbuhan dan pengembangan *democratic civility*, maka *civil society* (CS atau masyarakat madani/masyarakat kewargaan/masyarakat sipil) dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental.

Terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara *taken for granted* menerima bahwa CS selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan, bahwa CS terorganisasi berdasarkan distingsi sosial, budaya, etnis, dan agama—sehingga cenderung eksklusif dan merasa paling benar sendiri; akibatnya dapat kontra-produktif dengan multikulturalisme, dan juga bahkan terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal CS seperti ini, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Juga harus dikembangkan CS yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi yang melintasi batas-batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi “*social and cultural capital*” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi yang berkeadaban (cf. Hefner 2001: 9-10).

Untuk pengembangan CS yang benar-benar merupakan “*social and cultural capital*” bagi keadaban dan demokrasi, pendidikan merupakan salah satu—jika tidak satu-satunya—sarana terpenting. Tidak perlu uraian panjang lebar, “*social and cultural capital*” sangat krusial dan instrumental bagi terwujudnya *social and cultural cohesiveness* dan, pada gilirannya, integrasi negara-bangsa. Sebaliknya, negara-bangsa dan masyarakat dapat

mengalami disintegrasi jika tidak memiliki *social and cultural capital*. Dalam pengembangan *social and cultural capital*, perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai nilai sosial-budaya, dan pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa-bernegara. Di sinilah terletak peran instrumental pendidikan.

Untuk penumbuhan dan pengembangan “*social and cultural capital*” melalui pendidikan, pendidikan kewargaan (*civic education*) menjadi sebuah keharusan. Keadaban dan demokrasi, sekali lagi, tak bisa dicapai secara *trial and error* atau diperlakukan secara *taken for granted*; sebaliknya justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan, dan pada setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui *Civic Education* dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, dan respek serta toleransi di antara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban (Azra, 2002).

Rejuvenasi Pancasila dan Demokrasi

Hemat saya, negara-bangsa Indonesia dan Pancasila adalah bentuk, esensi, dan prinsip dasar identitas, jati diri dan wawasan kebangsaan negara-bangsa Indonesia. Keduanya menghasilkan ‘*supra-identity*’ yang mengatasi tidak hanya identitas lokal, etnis dan daerah, tapi juga bahkan identitas global.

Tetapi, harus diakui, dalam masa Pasca-Soeharto, negara-bangsa Indonesia dan Pancasila menjadi goyah. Pada satu sisi, negara mengalami ‘*decentering of authority*’—pemencaran otoritas, bukan hanya karena adopsi sistem demokrasi yang memberikan otoritas lebih besar kepada lembaga legislatif, parpol, *civil society* dan sebagainya, tetapi juga pada saat bersamaan pada daerah melalui desentralisasi dan otonomisasi. Akibatnya, negara-bangsa Indonesia sebagai salah satu dari sedikit sumber dan rujukan identitas, ‘jatidiri’ dan wawasan kebangsaan Indonesia mengalami kemerosotan otoritas secara signifikan.

Hal yang sama juga terjadi pada Pancasila. Presiden BJ Habibie dalam *interregnum*-nya tidak hanya menerapkan demokrasi multi-partai dan otonomi, tapi juga menghapus kewajiban asas tunggal Pancasila, BP7 dan sekaligus Penataran P4. Pancasila seolah tidak lagi relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara; bahkan para pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila.

Karena itu, dalam restropeksi saya setelah Reformasi berlangsung lebih lima tahun, sejak 2003 saya mulai menggagas tentang perlunya ‘rejuvenasi Pancasila’. Gagasan saya tentang rejuvenasi Pancasila agaknya merupakan artikel pertama tentang Pancasila yang dimuat dalam Harian *Kompas*, media nasional paling banyak dibaca publik. Memang, sejak jatuhnya pemerintah Soeharto, para pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila, karena khawatir dituduh sebagai ‘agen’ atau bahkan ‘antek’ Orde Baru’.

Tetapi secara retrospektif, saya kian yakin tentang urgensi Pancasila sebagai salah satu faktor pemersatu. Dalam konteks itu, serangkaian tulisan saya tentang ‘Rejuvenasi Pancasila’ sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas dan jati diri negara-bangsa Indonesia mendapat pengayaan penting dari berbagai kalangan publik, khususnya melalui Tajuk Rencana *Kompas* maupun artikel Prof. Musa Asy’arie (*Kompas* 9, 11, 12 Juni 2004). Saya sendiri meresponi tanggapan publik tersebut dalam Harian *Kompas* 17 Juni 2004. Gagasan untuk rejuvenasi dan revitalisasi itu hilang-hilang timbul; dan saya kembali

menurunkan dua artikel di Harian *Kompas* tentang Pancasila pada kesempatan peringatan HUT RI ke-65 dan menjelang Hari Kesaktian Pancasila 2010.

Saya perlu mengelaborasi sedikit tentang relevansi Pancasila sebagai dasar jatidiri bangsa dan identitas nasional Indonesia di tengah keragaman dan masih banyaknya tantangan yang dihadapi negara-bangsa Indonesia dan kepemimpinan nasional sekarang ini. Tidak kurang pentingnya, saya juga melihat Pancasila dalam kaitan dengan tantangan krisis identitas budaya, dan akhirnya membahas identitas nasional dalam perspektif multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Saya berpandangan, rejuvenasi Pancasila harus pula ditempatkan dalam perspektif multikulturalisme, yang bisa disosialisasikan dan ditanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan pendidikan multikultural.

Apakah jati diri, identitas dan “ideologi” semacam Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas dewasa ini? Pertanyaan tentang relevansi ideologi umumnya dalam dunia yang berubah cepat sebenarnya tidak terlalu baru. Sejak akhir 1960, mulai muncul kalangan yang mulai mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks negara-bangsa tertentu maupun dalam tataran internasional. Pemikir seperti Daniel Bell pada akhir 1960an telah berbicara tentang “*the end of ideology*”. Tetapi perang dingin yang terus meningkat antara Blok Barat dengan ideologi kapitalisme dan Blok Timur dengan ideologi sosialisme-komunisme menunjukkan bahwa ideologi tetap relevan dalam kancah politik, ekonomi dan lain-lain.

Gelombang demokrasi (*democratic wave*) yang berlangsung sejak akhir 1980an, yang mengakibatkan runtuhnya rezim-rezim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, kembali membuat ideologi sebagai salah satu dasar bagi identitas negara bangsa seolah-olah tidak lagi relevan. Bahkan pemikir seperti Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai “*the end of history*”, masa “akhir sejarah” di mana ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat karena ideologi-ideologi dan sistem politik lain telah berakhir; dan itulah akhir sejarah. Sejarah baru adalah sejarah demokrasi liberal Barat.

Gelombang demokratisasi model Barat yang terjadi berbarengan dengan meningkatnya globalisasi seakan-akan terus membuat ideologi semakin tidak relevan dalam dunia yang kian tanpa batas. Tetapi, seperti sudah banyak diketahui, globalisasi mengandung banyak ironi dan kontradiksi. Pada satu pihak, globalisasi mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi dan identitas lain—baik universal maupun lokal—tetapi pada pihak lain, nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling kasar (*crude*), semacam *ethno-nationalism* dan bahkan *tribalism* justru menunjukkan gejala peningkatan. Gejala terakhir ini sering disebut sebagai penyebab “Balkanisasi”, yang terus mengancam integrasi negara-bangsa yang majemuk dari sudut etnis, sosial-kultural, dan agama seperti Indonesia. Meski ancaman disintegrasi Indonesia sangat menyurut dengan tercapainya perdamaian di Aceh, tetapi tidak ada jaminan bahwa separatisme GAM lenyap sama sekali di bumi Aceh; dan bahkan juga di Papua dengan OPMnya dan Maluku dengan RMSnya. Bahkan, otonomi dan desentralisasi yang belum terlalu jelas arahnya terus cenderung memperkuat sentimen kedaerahan, dengan penekanan yang kuat pada ‘Putra Asli Daerah’ dalam posisi dan proses politik.

Gelombang demokratisasi yang juga melanda Indonesia ber-ikut-an dengan krisis moneter, ekonomi dan politik sejak akhir 1997. Sementara itu membuat Pancasila sebagai basis ideologis, *common platform* dan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Terdapat setidaknya tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam semua perkembangan yang terjadi.

Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasi secara paksa melalui Penataran P4. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (*religious-based ideology*). Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethno-nationalism*. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun *by-implication* kian kehilangan posisi sentralnya.

Kecenderungan bahwa posisi Pancasila semakin sulit, hemat saya, cukup *alarming*, lampu kuning bagi masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Dalam pandangan saya, Pancasila—meski menghadapi ketiga masalah tadi—tetap merupakan kekuatan pemersatu (*integrating force*) yang relatif masih utuh sebagai *common platform* bagi negara-bangsa Indonesia. Kekuatan-kekuatan pemersatu lainnya, utamanya birokrasi pemerintahan Indonesia, telah mengalami kemerosotan signifikan. Pemerintah pusat di Jakarta, kini tidak lagi sekuat dan seefektif dulu. Pada saat yang sama, liberalisasi politik yang menghasilkan fragmentasi elit politik yang terus berlanjut, menghalangi kemunculan kepemimpinan nasional pemersatu; corak kepemimpinan *solidarity maker* yang dapat mencegah disintegrasi tetap belum tampil secara meyakinkan. Bahkan, para elit politik baik di tingkat nasional maupun lokal, masih terus terlibat dalam pertengkaran dan saling kecurigaan; pada tingkat lokal, kecenderungan ini bukan tidak sering berujung dengan kekerasan dan anarki di antara para pendukung masing-masing elit politik.

Saya percaya tidak ada yang salah dengan Pancasila *as such*. Yang keliru adalah membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaan. Karena itu tidak ada masalah dengan Pancasila itu sendiri, dan sebab itu, tidak pada tempatnya mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintah Orde Baru.

Lebih jauh, hemat saya, Pancasila telah terbukti sebagai *common platform* ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling *feasible* dan sebab itu lebih *viable* bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Sampai saat ini—dan juga di masa depan—saya belum melihat alternatif *common platform* ideologis lain, yang tidak hanya akseptabel bagi bangsa, tetapi juga *viable* dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya.

Karena posisi Pancasila yang krusial seperti ini, saya melihat urgensi mendesak rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya ideologi-

ideologi lain, termasuk yang berbasiskan keagamaan. Gejala meningkatnya pencarian dan upaya-upaya untuk penerimaan *religious-based ideologies* ini merupakan salah satu tendensi yang terlihat jelas di Indonesia pada masa pasca Soeharto. Kini bayang-bayang *religious-based ideology (ies)* itu diwujudkan antara lain dengan menetapkan dan memberlakukan berbagai peraturan daerah (Perda) yang dalam satu dan lain hal ‘berwarna Syari’ah’.

Rejuvenasi Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai *public discourse* (wacana publik). Dengan menjadikan Pancasila sebagai wacana publik, sekaligus dapat dilakukan *reassessment*, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus menerus, sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional pasca Soeharto, sejak dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal membawa Pancasila kembali ke dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila. Sudah waktunya kepemimpinan nasional memberikan perhatian khusus kepada ideologi pemersatu ini, jika mereka betul-betul peduli pada identitas nasional dan integrasi negara-bangsa Indonesia.

Penutup

Harus diakui, rejuvenasi Pancasila bukanlah hal mudah. Apalagi di tengah masih berlanjutnya disorientasi dan dislokasi—untuk tidak menyebut krisis—budaya dan peradaban bangsa kita. Jika Pancasila mengalami ‘krisis’ ketidakpedulian dari anak bangsa, banyak kalangan masyarakat kita terus juga mengalami krisis identitas dan jatidiri bangsa.

Dalam konteks kemajemukan dan keragaman—untuk tidak menyebut ‘multi-kulturalisme’—Indonesia, saya memandang perlu dilakukan tidak hanya rejuvenasi dan revitalisasi Pancasila; tak kurang pentingnya adalah diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi, tentu saja tidak melalui cara-cara indoktrinatif dan rezimentatif; tetapi sebaliknya melalui pendidikan multi-kultural, atau pendidikan lainnya semacam *civic education* (pendidikan kewargaaan), *democracy education* (pendidikan demokrasi), dan semacamnya.

Bibliografi

- Abdullah, Taufik, *Nasionalisme & Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2001.
- Azra, Azyumardi, "Religious-based Civil Society and Anti-Corruption Campaign: The Indonesian Experience in the Creation of Good Governance", dalam Helen James (ed), *Civil Society, Religion and Global Governance: Paradigms of Power and Persuasion*. London & New York: Routledge, 2007.
- , *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context*. Jakarta and Singapore: ICIP, TAF and Equinox-Solstice, 2006.
- , "Demokrasi Multikultural" dalam Harian *Republika*, 12 Agustus, 2004.
- , "Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional" dalam Harian *Kompas*, 17 Juni 2004.
- , "Peradaban Indonesia: Akselerasi Multikulturalisme", dalam makalah Seminar Nasional "Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", UIN Syarif Hidayatullah & Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Jakarta, 24 Juli 2004.
- , "From Civic Education to Multicultural Education with Reference to the Indonesian Experience" dalam makalah pada "Multicultural Education in Southeast Asian Nations: Sharing Experiences", Universitas Indonesia, 17-19 Juni, 2003.
- Jeffcoate, R., *Positive Image: Towards a Multiracial Curriculum*. London: Harper & Row, 1979.
- Fleras, Augie & Jean Leonard Elliott, *Multiculturalism in Canada: The Challenge of Diversity*. Scarborough, Ontario: Nelson Canada, 1992.
- McLeod, Keith A., "Multiculturalism as Citizenship; Multiculturalism as Education", dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), *Liberal Democracy Citizenship & Education*. Ljubljana, Slovenia & Oakville, Ontario: Scientific Research Institute Slovenia & Mosaic Press, 2001.
- McLeod, Keith A. & Eva Krugly-Smolkska, *Multicultural Education: A Place to Start—A Guideline for Classrooms, Schools and Communities*. Ottawa: Canadian Association of Second Language Teachers, 1879.
- Minority Ethnic Teachers' Association, *Comments on Education in a Multicultural Society*. Glasgow: META, 1986.
- Moodley, Kogila (ed.), *Beyond Multicultural Education*. Calgary: Detselig Enterprises Ltd, 1992.
- Mullard, C., "Multiracial Education in Britain", dalam *Race, Migration and Schooling*. London: Holt, Rinehart & Winston, 1982.
- Nieto, S., *Affirming Diversity: The Socio-Political Context of Multicultural Education*. New York: Longman, 1992.
- Schools Conucil, *Education of a Multicultural Society*. London: CRE, 1981.
- Smyth, Geri, "Theoretical Approaches to Multicultural Education from a British Perspectives", dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), *Liberal Democracy Citizenship & Education*, Ljubljana, Slovenia & Oakville, Ontario: Scientific Research Institute Slovenia & Mosaic Press, 2001.

Strathclyde Regional Council, *Education in a Multicultural Society*. Glasgow: SRC, 1989.
de Vreede, E., "Underlying Assumptions in Plural Education", makalah disampaikan pada
Konperensi the Association for Teacher Education in Europe, Limerick, 1998.